

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA DI SD NEGERI MENDIRO KABUPATEN KULON PROGO

## *THE IMPLEMENTATION OF CULTURAL-BASED EDUCATION POLICY IN SD NEGERI MENDIRO KABUPATEN KULON PROGO*

Oleh: Septiana Ari Pudyastuti, Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Prodi Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, ariepudya@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya di SD Negeri Mendiro Kabupaten Kulon Progo, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya di SD Negeri Mendiro Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ialah kepala sekolah, guru kelas, guru ekstrakurikuler, siswa, dan karyawan/TU. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Milles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data dan teknik. Hasil penelitian sebagai berikut: 1) implementasi kebijakan di SD Negeri Mendiro Kabupaten Kulon Progo berupa integrasi pada mata pelajaran, ekstrakurikuler, percontohan dan pembiasaan, sosialisasi, serta pengkondisian sarana prasarana pendukung yang mencakup enam aspek meliputi: a) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan terdiri dari guru, siswa, kepala sekolah, dan warga sekolah; b) jenis manfaat yang dihasilkan yaitu meningkatkan pengetahuan pendidikan berbudaya dan memperbaiki karakter siswa; c) derajat perubahan yang diinginkan yaitu siswa menjadi lebih paham tentang pendidikan berbasis budaya; d) kedudukan pengambil keputusan, pihak sekolah selalu terbuka dalam membuat program penunjang dengan mengundang komite sekolah untuk menerima aspirasi dan usulan; e) pelaksana program yaitu guru, siswa, kepala sekolah, dan warga sekolah; serta f) sumber daya yang disediakan terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. 2) Faktor pendukung meliputi: budaya sekolah yang tercipta telah berjalan, adanya dukungan dan kerjasama dari orangtua siswa dan masyarakat, kemampuan dan pengalaman dari pendidik, serta antusias dan kemampuan peserta didik yang potensial. Sedangkan faktor penghambat meliputi minat peserta didik terhadap budaya masih berubah-ubah, adanya beberapa guru kurang memahami pendidikan berbasis budaya secara menyeluruh, dan belum lengkapnya sarana prasarana menjadi faktor penghambat yang utama.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, pendidikan berbasis budaya, SDN Mendiro, kabupaten Kulon Progo

### **Abstract**

*This research has aim to describe, supporting factors, and obstacles of cultural-based education policy implementation in SD Negeri Mendiro Kabupaten Kulon Progo. This is a qualitative descriptive research. The subjects of this research are the headmaster, classroom teachers, extracurricular teachers, students, and administrator staff. To gather the data, the researcher used observation, interview, and documentation technique. In analyzing the data, Milles and Huberman model is utilized which consists of data reduction, data serving, and conclusion. To run the data validity test, technique and data source triangulation are implemented. There are two results of the research. 1) The policy implementation in the form of integration program on learning subjects, extracurricular, sequential and habituation, socialization, and conditioning the supporting facilities and infrastructures that includes six aspects include: a) affected teachers, students, headmaster, and school society; b) enhanced the cultured education knowledge and improve student character; c) students could understand the cultural-based education; d) arranged the program by accepting aspiration and suggestion; e) was conducted by the teachers, headmaster, and school society; and f) assembled the human resource and the facilities and infrastructures. 2) Supporting factors included: good school culture, support and cooperation from the student parents and society, educators' ability and experience, and enthusiasm and potential capabilities of the students. On the other side, the obstacle factors consisted of the interest of students toward cultural was still labile, there were some teachers who did not understand well the cultural-based education entirely, and the main obstacle was the incompleteness of school's facilities and infrastructure.*

*Keywords: policy implementation, cultural-based education, SDN Mendiro, Kulon Progo district*

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah luas dengan berbagai suku bangsa dan setiap daerah mempunyai budaya serta ciri khas. Melimpahnya kebudayaan Indonesia menjadi salah satu karakteristik multikultural yang perlu dijaga dan dilestarikan, sehingga tujuan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai keluhuran bangsa dapat terwujud. Pengenalan budaya sedini mungkin penting diberikan kepada peserta didik agar mereka mengenal lingkungannya. Usaha dalam membudayakan dan menumbuh kembangkan budaya dapat dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal, informal, dan non-formal.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal mempunyai kedudukan penting bagi siswa dalam peningkatan pengetahuan baik secara akademik maupun non-akademik serta mewariskan nilai luhur budaya. Pendidikan tidak hanya sebagai sarana *transfer of knowledges* pada siswa, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Selain pihak sekolah, peran pendidikan dalam keluarga juga memiliki andil yang cukup besar pada pembentukan jati diri dan karakter anak.

Pendidikan dan kebudayaan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, melainkan saling melengkapi. Hasbullah (2008: 1) menyatakan bahwa pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai didalam masyarakat dan kebudayaan. Tugas pendidikan dalam mempertahankan nilai luhur budaya dapat dilakukan dengan mengenalkan kebudayaan,

diantaranya mengintegrasikan pada mata pelajaran, melakukan pembiasaan di kehidupan sehari-hari seperti budaya disiplin, budaya bersih, budaya baca, dan budaya lainnya, serta adanya kegiatan ekstrakurikuler seperti batik, karawitan, tari tradisional, pramuka, dan kebudayaan lainnya yang ada di daerah setempat.

Bangsa Indonesia kaya akan budaya yang memiliki unsur-unsur nilai, moral, norma, dan etika kepribadian. Namun, saat ini mulai memudar dan dilupakan oleh sebagian besar masyarakat akibat semakin majunya arus globalisasi yang membuat proses pendidikan kurang mengedepankan budaya, sehingga berdampak pada tergesernya budaya bangsa. Umumnya hal yang tidak menguntungkan tersebut didukung sikap kurang baik, bahasa semakin terkikis oleh bahasa gaul remaja masa kini, kedisiplinan semakin memudar, dan sikap *hipokrit* semakin merajalela.

Pemberian pendidikan berbudaya tidak hanya bersifat fisik semata, tetapi juga non-fisik. Seperti budaya disiplin, budaya baca, budaya toleransi, budaya jujur, dan budaya bersih. Budaya non-fisik juga perlu diperhatikan karena masih banyak terjadi penyimpangan yang terjadi pada anak usia sekolah, seperti perkelahian antarpelajar yang kini marak akibat kurangnya pengendalian diri dan kurangnya sikap toleransi terhadap perbedaan. Lunturnya nilai kebudayaan bangsa juga diakibatkan dari pemahaman pendidik mengenai pemaknaan pendidikan berbasis budaya masih kurang, dimana sebagian pendidik memaknai pendidikan berbasis budaya sebatas budaya fisik semata.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dimuat media online [tribunnews.com](http://m.tribunnews.com) pada tanggal 21 Desember 2013 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013 ada 255 kasus tawuran antarpelajar di Indonesia, sebanyak 20 pelajar Indonesia tewas sia-sia karena tawuran. Angka ini meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya, yang hanya 147 kasus. Meningkatnya kasus tawuran tidak bisa dibebankan pada kesalahan peserta didik semata. Banyak faktor di sekitarnya yang mempengaruhi, seperti pergaulan di tengah masyarakat atau dengan teman-teman usia remaja (Sumber: <http://m.tribunnews.com/nasional/2013/12/21/tahun-ini-20-pelajar-indonesia-tewas-karena-tawuran>).

Melihat kondisi tersebut, maka diperlukan kegiatan/program dalam mengatasinya. Kegiatan atau program dapat berjalan dengan baik apabila terdapat kerjasama dari seluruh elemen yang ada dalam mempraktekkan, mengenalkan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya di kehidupan sehari-hari. Salah satu cara mewariskan nilai budaya yang semakin hilang diperlukan aktivitas pedukung terwujudnya masyarakat yang baik, tanpa mengecualikan dan menghilangkan unsur asli budaya. Salah satu cara paling efektif dan efisien dengan pendidikan berbasis budaya.

Pendidikan berbasis budaya dapat dilakukan setiap individu baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Selain itu, pihak pemerintah juga perlu mendukung penerapan pendidikan berbasis budaya. Pemerintah perlu memfasilitasi, mewedahi, dan membuat rancangan yang tepat dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya, karena pendidikan berbasis budaya penting untuk

diterapkan oleh bangsa Indonesia. Pemerintah bisa menyelenggarakan pendidikan berbasis budaya yang komprehensif dan integral, misalnya: dalam media cetak maupun elektronik memuat budaya bangsa, seperti lagu-lagu daerah, tarian daerah, lagu nasional karena kebudayaan tersebut merupakan kekayaan bangsa yang perlu dilestarikan serta budaya negatif seperti korupsi, budaya tidak disiplin waktu, dan budaya negatif lainnya perlu dihilangkan agar tercipta masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda yang beretika, bermartabat tinggi, kaya akan pengetahuan, dan menjunjung tinggi nilai kebudayaan bangsa.

Sejalan dengan hal tersebut, maka provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) DIY Nomor 5 Tahun 2011. Peraturan tersebut dibuat berdasar pertimbangan visi dari pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana pada tahun 2025 menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan, budaya, dan tujuan pariwisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Beberapa sekolah dasar di DIY telah menerapkan Pendidikan Berbasis Budaya, salah satunya SD Negeri Mendiro Kabupaten Kulon Progo. Hasil observasi dan wawancara pra penelitian tanggal 12 Desember 2015 kepada salah satu guru di SD Negeri Mendiro diketahui bahwa sekolah tersebut telah menerapkan pendidikan berbasis budaya sejak dikeluarkan kebijakan pendidikan berbasis budaya dari Perda (Peraturan Daerah) DIY Nomor 5 Tahun 2011. Siswa SD Negeri Mendiro dibekali pada pengembangan dan pelestarian seni batik, serta seni tari dan

karawitan, budaya disiplin, budaya membaca, dan budaya bersih. Namun, dibalik itu semua SD Negeri Mendiro tidak terlepas dari permasalahan yang ada, khususnya dalam hal fasilitas. Padahal dalam pelaksanaan pendidikan berbasis budaya dapat berjalan dengan baik, apabila didukung fasilitas yang memadai, kerjasama yang baik, dan sumber daya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan berbasis budaya di SD Negeri Mendiro Kabupaten Kulon Progo, karena SD tersebut merupakan sekolah dasar pertama berbasis budaya di Kulon Progo, serta sekolah yang dapat menyusun dan menyelenggarakan program pendidikan kental akan budaya, baik budaya fisik maupun budaya non-fisik.

Implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya merupakan topik penting dan menarik untuk diteliti, oleh karena itu peneliti menyimpulkan fokus penelitian yaitu implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya di SD Negeri Mendiro Kabupaten Kulon Progo.

Adapun penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya, dan apa sajakah faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya di SD Negeri Mendiro Kabupaten Kulon Progo. Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya dan mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya di SD Negeri Mendiro Kabupaten Kulon Progo. Manfaat dalam penelitian yang dapat diambil secara teoritis yaitu dapat

memperkaya ilmu pengetahuan yang mungkin akan diteliti pada penelitian selanjutnya.

Adapun teori terkait penelitian ini yaitu: (1) kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan negara/kebijakan publik pada umumnya (Arif Rohman, 2009: 108); (2) implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Arif Rohman (2012 : 106) dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta diarahkan kepada pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditentukan terlebih dahulu, yaitu tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk mentransformasikan keputusan ke dalam istilah operasional, maupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang mana diamanatkan pada keputusan-keputusan kebijakan.

Teori Grindle (dalam Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 220) menjelaskan bahwa teori ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Ide dasarnya adalah setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implemntability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuat kebijakan
- e. Pelaksana program
- f. Sumber daya yang dikerahkan

Sementara konteks implementasinya yaitu:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa

c. Kepatuhan dan daya tanggap

(3) Ki Hadjar Dewantara (dalam H.A.R. Tilaar, 2000: 68) bahwa kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan, bahkan kebudayaan dasar pendidikan. Artinya pendidikan tidak hanya didasarkan aspek intelektual, tetapi kebudayaan sebagai keseluruhan/seni budaya dan nilai luhur budaya/perilaku. Pengimplementasian pendidikan berbasis budaya telah diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendidikan nilai luhur budaya dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai jalur, jenjang, dan tingkat perkembangan jiwa siswa.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mencari data melalui proses implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya di SD Negeri Mendiro Kabupaten Kulon Progo. Peneliti juga mengumpulkan data mengenai program, faktor pendukung, dan penghambat dalam bentuk keterangan-keterangan/fakta-fakta yang didapat melalui observasi, wawancara, serta pengumpulan dokumentasi selanjutnya dilaporkan.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Mendiro Kabupaten Kulon Progo. Alasan peneliti memilih SD Negeri Mendiro Kabupaten Kulon Progo karena merupakan sekolah dasar pertama berbasis budaya di Kabupaten Kulon Progo serta sekolah dapat menyusun dan menyelenggarakan program pendidikan kental akan budaya, baik budaya fisik maupun budaya non-fisik.

Waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan pada bulan April sampai dengan Juni 2016.

### **Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah 2 guru kelas, 4 guru ekstrakurikuler, 1 kepala sekolah, 1 TU/karyawan, dan 2 siswa.

Sedangkan objeknya adalah implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya di SD Negeri Mendiro Kabupaten Kulon Progo.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam mendapatkan dan mengumpulkan data. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur agar subjek penelitian lebih terbuka dalam memberikan data. Sedangkan dokumentasi untuk mendukung dan melengkapi bagi data primer yang diperoleh.

### **Instrument Penelitian**

Instrument penelitian ini menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara, dan studi dokumen. Aspek yang dikaji dalam kisi-kisi instrument observasi berupa aspek secara fisik seperti keadaan sekolah/lokasi, dan sarana prasarana sekolah. Sedangkan observasi kegiatan meliputi pelaksanaan pembelajaran, aktivitas siswa, pelaksanaan program pendidikan berbasis budaya, interaksi guru dan siswa. Sumber data berasal dari lingkungan sekolah. Aspek yang dikaji dalam instrument wawancara adalah implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya, faktor pendukung dan penghambat dengan sumber data guru kelas, guru ekstrakurikuler, kepala sekolah, siswa, TU/karyawan. Sedangkan aspek yang dikaji dalam instrument dokumentasi berupa profil sekolah, foto kegiatan, file-file, dan sebagainya.

### **Teknik Analisis Data**

Bogdan dalam Sugiyono (2011: 244), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain, sehingga mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan analisis data *interactive model* berdasarkan model analisis Miles and Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2011: 246).

### **Keabsahan Data**

Peneliti dalam melakukan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek sumber yang sama dengan teknik berbeda.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pendidikan berbasis budaya merupakan salah satu cara yang digunakan untuk melestarikan kebudayaan. Kebudayaan bukan diturunkan tetapi melalui proses sosialisasi. Menyadari akan pentingnya suatu budaya dalam pendidikan, maka pemerintah membuat sistem pendidikan nasional yang didalamnya mengandung budaya. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pendidikan berbasis budaya yang harus diterapkan setiap jenjang pendidikan. Pengaturan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) DIY Nomor 5 Tahun 2011. Selain itu Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 68 Tahun 2012 juga terdapat pedoman mengenai nilai-nilai luhur

budaya yang harus ada didalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Kemudian kebijakan tersebut diimplementasi dalam bentuk program oleh SD Negeri Mendiro Kabupaten Kulon Progo, yaitu penerapan visi dan misi sekolah, penyesuaian pada kurikulum dan materi pendidikan, pengajaran melalui program pendidikan (*intrakurikuler* dan *ekstrakurikuler*), percontohan dan pembiasaan, sosialisasi, serta pengkondisian sarana prasarana pendukung.

Untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya di SD Negeri Mendiro Kabupaten Kulon Progo mengacu pada teori implementasi yang dijabarkan oleh Grindle. Adapun isi kebijakan mencakup sebagai berikut:

#### a. Kepentingan yang Terpengaruhi

Suatu kebijakan akan sulit diimplementasikan apabila isi kebijakan menyangkut banyak kepentingan didalamnya. Kepentingan yang dipengaruhi dalam tahap implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya telah diatur pada Perda DIY Nomor 5 Tahun 2011 serta Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 68 Tahun 2012. Kebudayaan di sini tidak hanya budaya dari segi seni semata namun budaya dari segi nilai-nilai luhur budaya/perilaku. Kepentingan yang terpengaruhi adanya kebijakan pendidikan berbasis budaya dan kemudian dituangkan ke dalam program-program adalah semua warga sekolah seperti guru, kepala sekolah, karyawan dan warga sekolah, serta secara khusus siswanya.

#### b. Jenis Manfaat yang Dihasilkan

Grindle (1980) dalam bukunya "*Politics and Policy Implementation in The Third World*" mengatakan bahwa sebuah kebijakan yang jelas,

dan memberikan manfaat aktual kepada banyak pelaku lebih mudah diimplementasikan dibanding kebijakan yang kurang bermanfaat. Suatu kebijakan biasanya memiliki input atau hasil yang bersifat positif ataupun negatif hal ini berkaitan erat dengan respons yang diberikan oleh objek dari kebijakan tersebut. Tujuan dikeluarkan kebijakan pendidikan berbasis budaya untuk menjunjung tinggi kebudayaan.

Begitu pula halnya dengan SD Negeri Mendiro Kabupaten Kulon Progo menjadi contoh sekolah yang didalam pendidikannya menjunjung tinggi kebudayaan. Kebudayaan yang dimaksud adalah baik dari segi seni budaya maupun perilaku/tata kramanya. Artinya tidak hanya mengedepankan aspek kognitif semata tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik, sehingga lulus dari SD dapat memiliki keterampilan sesuai minat dan bakat siswa serta berkarakter yang baik. Nilai-nilai luhur budaya yang diajarkan di SD Negeri Mendiro Kabupaten Kulon Progo antara lain nilai kedisiplinan, kesopanan, kebersihan, nilai ketekunan, dan nilai kepedulian. Namun, SD Negeri Mendiro Kabupaten Kulon Progo sendiri dalam pendidikan berbasis budaya yang lebih ditonjolkan untuk saat ini pada segi kebudayaan secara lahir karena masih diperlukan sosialisasi, baik kepada siswa maupun masyarakat sekitar.

#### c. Derajat Perubahan yang Diinginkan

Setiap program tentu memiliki tujuan yang menginginkan perubahan. Begitu juga siswa yang bersekolah di SD Negeri Mendiro Kabupaten Kulon Progo memiliki kemampuan berbeda-beda didalam memahami dan menjalankan program-program penunjang pendidikan berbasis budaya. Perbedaan itulah yang membuat siswa memiliki

rasa ingin tahu yang tinggi dan semangat dalam diri siswa untuk mengetahuinya, terutama bagi siswa kelas rendah yang masih kurang paham dengan pendidikan berbasis budaya. Namun, pihak sekolah telah berupaya untuk memahamkan pemikiran siswa khususnya kelas rendah mengenai pendidikan berbasis budaya dengan adanya kegiatan-kegiatan penunjang. Pada program penunjang dari kebijakan pendidikan berbasis budaya siswa memiliki perubahan karakteristik dan sikap menjadi lebih berbudaya, memahami arti pendidikan berbudaya, serta guru dituntut mengetahui dan menguasai pendidikan berbasis budaya, karena salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

#### d. Kedudukan Pembuat Kebijakan

Isi sebuah kebijakan akan menunjukkan posisi pengambilan keputusan. Implikasi dari jumlah pengambil keputusan adalah semakin banyak yang terlibat akan semakin menyulitkan didalam implementasi kebijakannya. Demikian pula halnya dengan kebijakan pendidikan berbasis budaya pada Perda DIY Nomor 5 Tahun 2011 dan Pergub DIY Nomor 68 Tahun 2012 yang menentukan kebijakan tersebut pemerintahan eksekutif atau pemerintah DIY.

Kepala sekolah sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan harus dapat memahami dan mengerti keadaan lingkungannya. Untuk itu agar aturan ini berjalan sesuai harapan dan tujuan, maka dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak, baik pihak sekolah sendiri seperti guru maupun siswa serta pihak luar sekolah untuk membentuk program penunjang sesuai kebutuhan. Para pembuat kebijakan

menerima berbagai aspirasi dan usulan agar dapat membuat kebijakan sesuai harapan.

e. Pelaksana Program

Pelaksanaan program sekolah berbasis budaya di SD Negeri Mendiro Kabupaten Kulon Progo melibatkan guru kelas dan guru ekstrakurikuler, dimana mereka memiliki hubungan cukup dekat dengan siswa sebagai sasaran utama dalam proses pembelajaran dan pelaksanaan program-program di kelas dan luar kelas. Pelaksanaan ekstrakurikuler sendiri telah diserahkan kepada pihak yang berkompeten dibidangnya, seperti ekstrakurikuler tari diampu oleh pendamping yang memiliki latar belakang seni tari, begitu juga dengan ekstrakurikuler batik dan karawitan. Ekstrakurikuler karawitan sendiri telah diampu oleh seniman yang mengetahui seluk beluk karawitan dan ekstrakurikuler batik oleh pengusaha batik di daerah sekitar sekolah.

Adanya kemampuan dan berkompeten sesuai dengan bidangnya, membuat pelaksanaan program ekstrakurikuler di SD Negeri Mendiro Kabupaten Kulon Progo terimplementasikan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan komite sekolah dan kepala sekolah sebagai pihak mengetahui, memfasilitasi, dan mendukung. Semua komponen sekolah saling bekerjasama mewujudkan pendidikan berbasis budaya sesuai dengan tujuan yang dibuat pemerintah. Senada dengan yang dikemukakan Grindle (1980) bahwa apabila pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan, maka tingkat keberhasilannya juga akan tinggi.

f. Sumber daya yang Dikerahkan

Sumber daya yang dikerahkan meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, dan finansial. Sumber daya manusia meliputi seluruh warga sekolah termasuk guru kelas, siswa, dan guru ekstrakurikuler serta sarana prasarana penunjang berupa fasilitas penunjang pendidikan berbasis budaya, seperti satu set gamelan, satu set alat batik, pendopo, ruang kelas, peralatan menari, slogan-slogan, mading pohon, dan fasilitas penunjang lainnya. Sedangkan sumber daya finansial dalam pelaksanaan semua program sekolah yang direncanakan menggunakan dana dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Grindle (1980) dalam bukunya yang berjudul *Politics and Policy Implementation in The Third World* bahwa adanya sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, tentu akan mempermudah dalam pelaksanaannya. Sumber daya yang dimaksud antara lain tenaga kerja, keahlian, pendanaan, serta sarana dan prasarana.

Sementara konteks implementasinya, yaitu:

a. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor

Pada segi kekuasaan dan kepentingan, pihak sekolah selalu terbuka dan selalu mengadakan perbaikan, pengembangan, serta mengatur suatu strategi agar program tetap berjalan dengan baik.

b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Pihak sekolah selalu terbuka dan berkoordinasi, baik dengan Dinas Pendidikan, komite sekolah, orangtua siswa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya agar pelaksanaan kebijakan pendidikan berbasis budaya melalui program-



program yang telah direncanakan dapat terlaksana dan diterima sesuai perencanaan sebelumnya.

c. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana dapat dilihat dari pelaksanaan beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan dari masing-masing pelaksana. Program-program yang dilaksanakan SD Negeri Mendiro Kabupaten Kulon Progo tidak terdapat kendala yang berarti untuk kepatuhan dan daya tanggap pendidik dan siswa. Namun, dalam pelaksanaan program masih terdapat program yang belum optimal yaitu program ekstrakurikuler hanya mengedepankan bidang seni semata, untuk itu diperlukan daya tanggap lebih khususnya guru.

Berikut komponen-komponen atau program-program penunjang yang ada dalam implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya di SD Negeri Mendiro Kabupaten Kulon Progo:

a. Penerapan Visi dan Misi Sekolah

Penerapan visi, misi, dan tujuan sekolah yang dilaksanakan SD Negeri Mendiro Kabupaten Kulon Progo berfungsi memaksimalkan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya artinya dengan pendidikanlah suatu budaya ada di dalamnya serta antara pendidikan dengan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Adanya visi dan misi diharapkan siswa selain memiliki kecerdasan juga memiliki jiwa seni dan berbudi pekerti luhur sehingga nantinya bermanfaat untuk masa depannya. Keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan pendidikan berbasis budaya di SD Negeri Mendiro Kabupaten Kulon Progo dilihat dari nilai-nilai yang telah tertanam dalam diri siswa. Namun, dalam pengukuran keberhasilan pendidikan berbasis budaya tersebut, sekolah tidak memiliki patokan pasti.

b. Penyesuaian pada Kurikulum dan Materi

Pelaksanaan pendidikan berbasis budaya di SD Negeri Mendiro Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 dan dikembangkan materi-materi yang ada dengan diintegrasikannya ke dalam setiap mata pelajaran. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan hal yang diperoleh peserta didiknya terutama dari segi seni dan perilakunya

c. Pengajaran Melalui Program Pendidikan

Sekolah melakukan pemaksimalan pendidikan berbasis budaya melalui berbagai macam program pendidikan, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler antara lain batik menjadi ekstrakurikuler wajib, ekstrakurikuler tari, dan ekstrakurikuler karawitan. Sedangkan untuk nilai-nilai luhur budaya dan budi pekerti tidak disampaikan melalui pelajaran tertentu, tetapi diintegrasikan dalam semua pelajaran yang ada.

Pendidik diberikan wewenang untuk mengatur sedemikian rupa program penunjang pendidikan berbasis budaya, sehingga dapat disesuaikan pada kondisi siswa yang ada. Mayoritas program-program pendidikan berbasis budaya di sekolah ini merupakan program pembelajaran seni dan budaya.

d. Percontohan (Teladan) dan Pembiasaan

Dalam penyampaian nilai-nilai luhur budaya dan budi pekerti dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan serta warga sekolah terutama guru dengan adanya percontohan atau teladan dan pembiasaan kepada siswa. Pembiasaan dan percontohan yang ada di SD Negeri Mendiro Kabupaten Kulon Progo dengan adanya budaya

bersih, budaya disiplin, budaya literasi, dan budaya santun, serta budaya salam dan sapa. Selain itu, ketika peringatan hari Kartini siswa dianjurkan untuk memakai pakaian adat Jawa, begitu juga guru memberikan contoh ikut memakai pakaian tersebut. Sekolah juga mengisi dengan adanya berbagai macam perlombaan dan pentas seni dari siswa. Keberhasilan dari kegiatan ini lebih dilihat pada perilaku siswa yang ada.

e. Program Sosialisasi Sekolah Berbasis Budaya

Pihak-pihak yang terlibat dalam sosialisasi antara lain guru, orangtua siswa, kepala sekolah, guru ekstrakurikuler, komite sekolah, dan perangkat desa. Tujuan dari sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat maupun orang tua siswa, karena masih terdapat perbedaan persepsi mengenai pendidikan berbasis budaya. Sosialisasi dilakukan ketika pembagian raport maupun efent-efent tertentu, seperti peringatan hari Kartini tanggal 28 April 2016.

f. Pengkondisian Sarana Prasarana Pendukung

Memaksimalkan pelaksanaan kebijakan pendidikan berbasis budaya tidak akan terlepas pada sarana dan prasarana serta lingkungan sekolah yang baik, karena tanpa adanya dukungan sarana prasarana dan lingkungan yang memadai maka kegiatan-kegiatan tidak dapat berjalan dengan maksimal. Sarana prasarana yang ada di SD Negeri Mendiro Kabupaten Kulon Progo tidak semuanya milik sekolah, tetapi juga masyarakat sekitar. Prasarana yang digunakan dalam menunjang program pendidikan berbasis budaya, antara lain: (1) ruang kelas, (2) halaman sekolah, (3) pendopo Dusun Wonolopo, (4) mading pohon, (5) slogan, poster, dan lukisan batik maupun tokoh

pewayangan baik di tembok ruangan serta gerbang sekolah.

Pelaksanaan program pendidikan berbasis budaya terdapat beberapa faktor pendukung yaitu budaya sekolah yang tercipta berjalan baik, terdapat dukungan dari pemerintah dengan adanya kebijakan penyelenggaraan pendidikan berbudaya, adanya dukungan dan kerjsama dari orangtua siswa serta masyarakat, kemampuan dan pengalaman pendidik yang ada, serta kemampuan siswa potensial.

Selain faktor pendukung, ada juga faktor penghambat seperti minat dari siswa terhadap budaya masih sering berubah-ubah, sarana prasarana yang masih belum lengkap, dan adanya beberapa guru kurang memahami pendidikan berbasis budaya secara menyeluruh.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

### **1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Budaya di SD Negeri Mendiro Kabupaten Kulon Progo**

Implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya di SD Negeri Mendiro Kabupaten Kulon Progo disesuaikan dengan visi dan misi yang ada serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Dalam melaksanakan kebijakan yang telah tertuang di PERDA DIY Nomor 5 Tahun 2011 SD Negeri Mendiro melakukannya melalui berbagai macam program antara lain mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran sehingga memberikan dimensi pada mata pelajaran; adanya ekstrakurikuler batik, karawitan, dan tari; percontohan dan pembiasaan

yang dilakukan secara langsung seperti guru memberikan contoh dalam hal kerapian menggunakan pakaian, tutur kata, dan sopan santun dalam berperilaku. Selain itu untuk pembiasaan dilakukan untuk mengaplikasikan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya melalui cuci tangan sebelum dan sesudah makan dan piket kelas mengajarkan nilai kebersihan dan kedisiplinan, memberikan salam dan berjabat tangan saat bertemu guru maupun teman mengajarkan nilai menghormati/toleransi, menjenguk teman yang sakit mengajarkan nilai kepedulian, mengajak siswa untuk rajin membaca buku dan mengerjakan tugas mengajarkan nilai kedisiplinan dan tanggungjawab, sedangkan untuk pengkondisian sarana prasarana pendukung agar pembelajaran menjadi lebih efektif antara lain adanya penempelan slogan-slogan, dan penempelan tokoh pewayangan maupun gambar-gambar berkenaan dengan kebudayaan, serta adanya sosialisasi kepada pihak masyarakat sekitar dan orangtua siswa untuk memberikan pemahaman tentang pendidikan berbasis budaya secara menyeluruh. Namun, untuk penanaman nilai-nilai budaya di SD Negeri Mendiro belum terimplementasikan secara penuh, khususnya pada program ekstrakurikuler. Dimana program ekstrakurikuler yang ada masih mengedepankan pada aspek kesenian semata. SD Negeri Mendiro dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pendidikan berbasis budaya selalu terbuka dan menerima saran dari pihak manapun serta melibatkan komite sekolah, dengan tujuan memperbaiki program-program yang ada sehingga pengimplementasian pendidikan berbasis budaya terwujud dan sesuai harapan. Kepentingan yang

terpengaruhi oleh kebijakan terdiri dari sekolah atau guru dan kepala sekolah sebagai pelaksana dari hasil kebijakan yang ditetapkan, dan siswa sebagai sasaran utama dalam kebijakan pendidikan berbasis budaya. Adanya pendidikan berbasis budaya di SD Negeri Mendiro membuat sekolah menjunjung tinggi akan kebudayaan, baik dari segi seni maupun perilakunya. Derajat perubahan yang diinginkan dari SD Negeri Mendiro setelah adanya program-program penunjang yaitu siswa menjadi lebih mengetahui dan paham akan pendidikan berbasis budaya, khususnya kelas rendah serta menjadikan siswa memiliki karakter yang lebih baik lagi karena perubahan perilaku siswa menjadi tolak ukur keberhasilan dari pendidikan berbasis budaya di SD Negeri Mendiro. Pelaksanaan suatu program tentu tidak akan terlepas dari sumberdaya yang dikerahkan, dimana sumberdaya yang dikerahkan SD Negeri Mendiro yaitu sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana, dan sumber daya anggaran. Tanpa adanya semua sumberdaya tersebut, maka program-program yang ada tidak dapat terimplementasikan. Selain itu, juga dibutuhkan adanya kerjasama dan koordinasi dengan semua komponen sekolah, seperti kepala sekolah, guru, siswa, komite sekolah, serta masyarakat sekitar. Pelaksanaan program-program penunjang kebijakan pendidikan berbasis budaya di SD Negeri Mendiro menggunakan anggaran yang bersumber dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Budaya di SD Negeri Mendiro Kabupaten Kulon Progo

- a. Faktor pendukung implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya yaitu 1) tujuan sekolah yang menyebutkan bahwa ingin menghasilkan siswa berwawasan budaya dan lingkungan sehingga nantinya dapat mengamalkan dalam nilai-nilai luhur budaya ke dalam masyarakat dan adanya peraturan dari pemerintah DIY; 2) budaya sekolah yang tercipta telah berjalan; 3) dukungan dan kerjasama dari orangtua siswa dan masyarakat telah terjalin; 4) kemampuan dan pengalaman dari pendidik; serta 5) antusias dan kemampuan siswa potensial.
- b. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya yaitu 1) minat dari siswa terhadap budaya masih sering berubah-ubah; 2) sarana prasarana masih belum lengkap; 3) beberapa guru kurang memahami pendidikan berbasis budaya secara menyeluruh.

### Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mempunyai saran antara lain:

1. Perlu adanya peningkatan keterlibatan dari semua pihak, baik sekolah, masyarakat, dan keluarga. Karena dalam menerapkan pendidikan berbasis budaya tidak hanya sekolah yang lebih berperan, tetapi peran orangtua dan masyarakat mutlak diperlukan.
2. Perlunya penjelasan yang lebih rinci mengenai pendidikan berbasis budaya, khususnya dari segi nilai-nilai budaya sehingga pemahaman dari guru khususnya dapat tercapai dan nilai-nilai budaya bukan sekedar sebagai pewarisan dan pelestarian,

tetapi lebih kepada pemaknaan dan pengembangan dari nilai budaya yang sudah ada.

3. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih atas Perda DIY Nomor 5 Tahun 2011 pada semua lingkungan pendidikan mengingat Perda tersebut belum diketahui oleh kalangan pendidik dan orangtua siswa.
4. Perlu adanya peninjauan kembali mengenai kebijakan pendidikan berbasis budaya, khususnya di kalangan pemerintah/pembuat kebijakan agar kebijakan yang dimaksudkan terlaksana sesuai harapan dan tujuan baik dari pembuat kebijakan maupun pelaksana kebijakan.
5. Pihak terkait diharapkan lebih memfasilitasi sekolah dalam pelaksanaan program pendidikan yang diinstruksikan terutama untuk pelatihan pendidik dan sarana pembelajaran.
6. Pendidik diharapkan lebih mengkreasikan kegiatan melalui program-program pendidikan berbasis budaya untuk meningkatkan minat siswa dan memaksimalkan kemampuan dari siswa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rohman. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- (2012). *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasinya*. Yogyakarta: Aswaja.
- Dinas Pendidikan DIY. (2011). *Peraturan Daerah DIY No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya*. Diakses dari <http://www.pendidikan-diy.go.id/file/perda/Perda-no-5-2011.pdf> pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2016. Jam 20.00 WIB.
- Grindle, M.S. (1980). *Politics and Policy Implementation In Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- H.A.R. Tilaar. (2000). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- H.A.R Tilaar & Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- H.M. Hasbullah. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Moh. Nazir. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rusdin Pohan. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Lamarka Publisher.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012.
- Yaspen Martinus. (2013). *Tahun ini 20 Pelajar Indonesia Tewas karena Tawuran*. Diakses dari <http://m.tribunnews.com/nasional/2013/12/21/tahun-ini-20-pelajar-indonesia-tewas-karena-tawuran> pada hari Jumat, tanggal 22 Februari 2016. Jam 08.26 WIB.